

Analisis Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat

Ulfa Nur Fajariya¹, Muftiatul Husna², Nabila Cesya Rahmalia³, Ahmad Saepulloh⁴,
Suhardi⁵

^{1,2,3,4,5} Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: ulfanurfa764@gmail.com¹, mftlhsna03@gmail.com²,

nabilacesyarahmalia@gmail.com³, ahmdsplh6@gmail.com⁴, suhardi.suhardi@uinjkt.ac.id⁵

Abstrak

Peningkatan kenakalan remaja di Jawa Barat seperti tawuran, kecanduan, dan kriminalitas mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Barak Militer (KDM) berbasis pendekatan disipliner dan karakter militer selama 14-30 hari. Dilengkapi dengan olahraga, pelatihan fisik, seni, pola hidup sehat, dan bela negara, program ini mendapat dukungan karena dianggap mampu menanamkan kedisiplinan dan patriotisme. Namun, kritik muncul terkait risiko trauma, pelanggaran hak anak, dan kurangnya evaluasi ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka untuk memahami responsivitas kebijakan publik, aktor pemangku kepentingan, dan realisasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan akuntabilitas program. Rekomendasi meliputi pergeseran ke model pembinaan berbasis hak anak, penguatan mekanisme monitoring, pengembangan rehabilitasi holistik, dan evaluasi transparan demi efektivitas jangka panjang.

Kata kunci: *Barak Militer, Hak Anak, Pembinaan Karakter*

Abstract

The increase in juvenile delinquency in West Java such as brawls, addiction, and crime has prompted the West Java Provincial Government to launch the Military Barracks Program (KDM) based on a disciplinary approach and military character for 14-30 days. Equipped with sports, physical training, art, healthy lifestyles, and national defense, this program has received support because it is considered capable of instilling discipline and patriotism. However, criticism has emerged regarding the risk of trauma, violations of children's rights, and the lack of scientific evaluation. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study to understand the responsiveness of public policy, stakeholder actors, and realization in the field. The results of the study indicate that cross-sector collaboration and public participation are important to improve the sustainability and accountability of the program. Recommendations include a shift to a child rights-based coaching model, strengthening monitoring mechanisms, developing holistic rehabilitation, and transparent evaluation for long-term effectiveness.

Keywords: *Military Barracks, Children's Rights, Character Building*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses di dalam menemukan transformasi baik dalam diri, maupun komunitas. Oleh sebab itu, proses pendidikan yang benar adalah membebaskan seseorang dari berbagai lingkungan, intimidasi, dan eksploitasi. Indonesia menghadapi peningkatan masalah kenakalan remaja seperti tawuran, kecanduan gadget, penggunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya, khususnya di wilayah Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) merespons kondisi ini dengan meluncurkan Program Barak Militer KDM sebuah inisiatif pembinaan remaja "nakal" melalui pendekatan disipliner dan karakter, dilaksanakan dalam fasilitas mirip barak TNI selama 30 hari. Hal ini terjadi jika pendidikan dijadikan instrumen oleh sistem penguasa yang ada hanya untuk mengungkung kebebasan individu. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki karakter remaja melalui rutinitas militeristik seperti olahraga, pelatihan fisik, seni, pengembangan bakat,

dan pola hidup sehat . Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra: sebagian pihak menganggapnya efektif dalam jangka pendek, tetapi lainnya mengkhawatirkan potensi trauma dan pelanggaran hak anak, serta minimnya evaluasi berbasis data ilmiah. Dalam UU RI SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, tentang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur melalui proses pembentukan kepribadian, kemandirian dan norma-norma tentang baik dan buruk. Manusia sebagai makhluk pengemban etika yang telah dikaruniai akal dan budi. Pentingnya pendidikan bagi setiap manusia, karena tanpa adanya pendidikan sangat mustahil suatu komunitas manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, mengalami perubahan, sejahtera dan bahagia sebagaimana pandangan hidup mereka (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Secara umum pendidikan karakter di Indonesia dibentuk melalui kegiatan seperti pramuka, kemah vokasional, dan sekolah adiwiyata. (Triningsih, 2022) Pramuka mampu menanamkan nilai gotong royong dan tanggung jawab melalui pengalaman langsung. Di era digital, pendekatan pendidikan karakter yang adaptif dan mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan digital siswa juga semakin penting (Karo-Karo et al., 2023).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkenalkan sebuah kebijakan kontroversial berupa Program Barak Militer yang diperuntukkan bagi remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja dan tindakan kriminal. Program ini dikenal dengan istilah KDM (Kenakalan, Delinkuen, dan Masalah Moral) dan diklaim sebagai upaya pembentukan karakter melalui pelatihan disiplin ala militer atau disebut dengan KDM Barak Militer. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya fenomena negatif di kalangan remaja, seperti tawuran antar pelajar, keterlibatan dalam geng motor, perundungan, serta penyalahgunaan zat adiktif

Kendati memiliki tujuan untuk pembinaan dan pendekatan militeristik. Akan tetapi hal ini menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama lembaga perlindungan anak dan akademisi. Mereka memandang bahwa penerapan pola asrama militer terhadap remaja berisiko mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan seperti KDM perlu didukung oleh mekanisme perlindungan HAM yang jelas dan kolaborasi lintas sektor, agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum anak yang progresif (Tofik Yanuar Chandra, 2023). Dalam konteks ini, model intervensi berbasis pendidikan, konseling, dan pemberdayaan komunitas lebih relevan diterapkan ketimbang strategi yang bersifat koersif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang kebijakan Program Barak Militer KDM dari perspektif teori pendidikan dan kebijakan publik. Hal ini juga akan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif, ramah anak, dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan konstitusional. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan penanganan kenakalan remaja yang tidak hanya responsif terhadap gejala permukaan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang kompleks secara sistemik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai landasan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dalam konteks kebijakan publik, khususnya dalam implementasi Program Barak Militer KDM di Jawa Barat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial-politik dan kebijakan yang sedang berlangsung dengan menekankan pada proses, makna, serta dinamika yang muncul dari berbagai aktor dan kepentingan di balik kebijakan tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan bukti-bukti konseptual dan dokumenter yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam hal ini, studi pustaka menjadi metode yang relevan karena memungkinkan peneliti menganalisis berbagai sumber sekunder secara terstruktur, termasuk regulasi pemerintah, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, dan artikel media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Responsivitas dalam Kebijakan Publik

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan menyajikan serta mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan upaya masyarakat. Semakin Banyak program diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan upaya masyarakat, maka semakin meningkatnya responsivitas (Rasdiana & Ramadani, 2021). Responsivitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik. Responsivitas mencerminkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misinya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah ini juga populer dalam dunia bisnis dan berarti kemampuan memberikan layanan dengan cepat. Dalam konteks pemerintahan, responsivitas mencakup kecepatan dan kepekaan aparat dalam menangani keluhan masyarakat. Indikator responsivitas meliputi: adanya keluhan, sikap aparat dalam meresponnya, pemanfaatan keluhan untuk perbaikan, tindakan yang memuaskan, dan penempatan masyarakat sebagai pihak yang dilayani (Yunanto & Fitriyani, 2025). Dengan demikian, responsivitas menunjukkan daya tanggap pemerintah dalam merespon kebutuhan dan keluhan publik secara aktif dan solutif. Responsivitas dalam kebijakan publik mengacu pada kemampuan suatu kebijakan untuk merespon kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang ada di Masyarakat. Kebijakan dapat dianggap responsif jika ia berhasil memahami dengan tepat perubahan sosial dan menciptakan solusi yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Dalam hal kebijakan Program Barak Militer KDM, tingkat responsivitas dapat dievaluasi berdasarkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dan perhatian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

Analisis Berdasarkan Teori Responsivitas Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat

1. Identifikasi Aktor dan Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat

Kebijakan Program Karakter Dalam Militer KDM diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai jawaban atas peningkatan perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti perundungan, kelompok motor, dan tindakan sosial yang nakal. Program ini bertujuan untuk membentuk kembali karakter para anggota dengan metode disiplin yang terinspirasi dari militer. Dalam ranah kebijakan publik, setiap strategi perlu memiliki pengenalan yang mendetail terhadap para pelaku dan pemangku kepentingan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aktor merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan mampu memengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu program. Istilah ini awalnya identik dengan "*stakeholder*" dalam bisnis, namun kini juga digunakan dalam administrasi publik seiring perkembangan negara dan kewirausahaan. Peran aktor bisa sebagai koordinator atau pelaksana kebijakan.

Pemangku kepentingan adalah mitra strategis yang memberi wawasan, dukungan, dan mendorong inovasi organisasi. Peran mereka penting dalam merespons perubahan dan menjaga keberlanjutan (Qurtubi, 2024). Dalam kebijakan pendidikan, aktor utama adalah pembuat kebijakan yang memiliki wewenang dan legitimasi. Selain itu, aktor lain seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan elit profesi juga berperan memberi tekanan dari luar. Semua aktor dituntut mematuhi aturan yang telah disepakati demi tercapainya tujuan bersama (Nurhidayah et al., 2023). Implementasi Program Barak Militer KDM di Jawa Barat melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah provinsi (Gubernur, Bappeda, Dinas Pendidikan) sebagai inisiator kebijakan berbasis karakter dan disiplin. TNI berperan menyediakan pelatihan semi-militer, sementara orang tua mendukung pembinaan karakter remaja secara berkelanjutan (Aisha et al., 2023). Peserta tetap menjalani pendidikan formal di sekolah asal yang berfungsi sebagai pendukung pembelajaran (Subroto & Hidayat, 2025). DPRD serta partai politik turut mengawasi dan mendorong replikasi program, sementara lembaga perlindungan anak memastikan pelaksanaan tetap sesuai prinsip hak anak. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan efektivitas pendekatan multiaktor dalam membentuk karakter dan menanggapi isu kenakalan remaja secara konstruktif.

2. Aspirasi dan Masukan dari Masyarakat

Program Barak Militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi, tokoh politik dan Gubernur di Jawa Barat periode 2025-2030, merupakan sebuah terobosan sosial dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja di Jawa Barat. Program ini menasar para remaja, khususnya pelajar yang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pembangkangan terhadap orang tua dan guru. Dengan pendekatan disiplin bergaya militer, program ini bertujuan untuk membentuk karakter remaja yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air. Mayoritas masyarakat, terutama para orang tua dan tokoh pendidikan, menyatakan harapan besar terhadap peran program ini dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Mereka menilai bahwa saat ini banyak generasi muda yang kurang memiliki rasa cinta tanah air, lemah dalam kedisiplinan, serta minim dalam pemahaman sejarah perjuangan bangsa. Dengan adanya barak militer yang menyediakan pelatihan bela negara, pelatihan disiplin fisik dan mental, serta pendidikan sejarah dan wawasan kebangsaan, diharapkan generasi muda Jawa Barat dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan berjiwa nasionalis. (Kang Dedi Mulyadi Official, 2024).

Banyak masyarakat pedesaan, khususnya dari Kabupaten Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya, menyampaikan aspirasi agar pelaksanaan program ini menjangkau pemuda-pemudi yang berada di wilayah terpencil. Sering kali, program pemerintah hanya terkonsentrasi di perkotaan. Program ini dinilai sebagai kesempatan emas untuk mengangkat potensi pemuda desa yang selama ini kurang terfasilitasi. Mereka berharap agar seleksi peserta tidak memprioritaskan latar belakang pendidikan tinggi atau domisili kota, melainkan lebih fokus pada motivasi, komitmen, dan potensi peserta dari desa-desa.

Selain dukungan, masyarakat juga memberikan sejumlah masukan yang membangun demi efektivitas dan keberlanjutan program. Beberapa di antaranya sangat relevan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan teknis program KDM di masa mendatang.

a. Pentingnya Sosialisasi dan Edukasi yang Merata

Banyak warga menyampaikan bahwa pemahaman terhadap Program KDM masih terbatas. Mereka mengharapkan adanya kegiatan sosialisasi aktif yang dilakukan di tingkat kecamatan dan desa, melalui pendekatan personal dan kultural. Misalnya, penggunaan bahasa daerah saat sosialisasi, penglibatan tokoh agama dan adat, serta pemanfaatan forum RT/RW dapat membantu menjelaskan maksud dan tujuan program secara lebih akrab. Warga tidak ingin program ini disalahpahami sebagai bentuk wajib militer atau pemaksaan pelatihan fisik berat.

b. Masukan Mengenai Seleksi dan Kurikulum Pelatihan

Warga meminta agar sistem seleksi peserta dibuat seadil mungkin. Tidak semua pemuda memiliki kondisi fisik yang prima, namun banyak yang memiliki semangat tinggi. Oleh karena itu, perlu ada jalur seleksi yang mempertimbangkan aspek motivasi dan komitmen, bukan hanya standar fisik semata. Selain itu, kurikulum pelatihan yang terlalu militeristik dinilai kurang cocok untuk semua peserta. Masyarakat mengusulkan agar ada pelatihan keterampilan tambahan seperti kepemimpinan komunitas, pertanian mandiri, penanggulangan bencana, serta kewirausahaan pasca pelatihan.

c. Monitoring dan Sistem *Feedback* Terbuka

Masyarakat meminta agar keberlangsungan program ini diawasi oleh lembaga yang hanya berasal dari militer atau pemerintah. Keterlibatan akademisi, LSM lokal, dan perwakilan peserta atau alumni sangat diharapkan. Mereka menyarankan dibuatnya forum bulanan atau triwulan sebagai wadah evaluasi dan diskusi, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, kendala, dan saran secara langsung. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program (Asbari, 2025).

Dukungan masyarakat terhadap Program Barak KDM bukanlah dukungan yang emosional semata, tetapi berdasarkan landasan rasional, pengalaman lokal, serta kebutuhan riil masyarakat akan peningkatan kapasitas diri dan komunitas (Azwar, 2023).

a. Membangun Ketahanan Nasional dari Tingkat Akar Rumput

Di tengah dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara, masyarakat menyadari bahwa ketahanan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer formal. Rakyat,

khususnya generasi muda, harus dibekali dengan kesiapsiagaan menghadapi krisis, konflik sosial, bencana alam, atau disrupsi teknologi. Program Barak KDM yang melibatkan warga sipil dalam pelatihan dasar pertahanan, disiplin, dan tanggap bencana, dianggap sebagai wujud nyata pertahanan semesta yang berbasis pada kekuatan sipil.

b. Penguatan Identitas dan Karakter Generasi Muda

Nilai-nilai patriotisme, disiplin, dan gotong royong yang mulai luntur di kalangan muda menjadi alasan utama masyarakat mendukung KDM. Banyak orang tua berharap agar anak-anak mereka mendapat pembentukan karakter melalui pelatihan fisik, mental, dan spiritual. Barak militer dapat menjadi tempat transformasi anak muda dari yang pasif dan konsumtif menjadi pribadi yang proaktif, beretika, dan memiliki semangat juang. Bahkan beberapa kepala desa mengusulkan agar alumni program diberdayakan menjadi kader-kader desa tangguh dan pelopor kegiatan sosial.

3. Analisis Tujuan dan Realitas Lapangan

Dalam beberapa kesempatan, Kang Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya kenakalan remaja dan keterbatasan guru dalam menangani siswa bermasalah. Menurutnya, banyak guru merasa tidak berdaya karena tindakan tegas terhadap siswa sering kali berujung pada kriminalisasi terhadap guru tersebut.

Sebagai solusi, Kang Dedi mengusulkan agar siswa dengan perilaku menyimpang diberikan pelatihan kedisiplinan di barak militer selama enam bulan. Selama masa tersebut, siswa tetap berstatus sebagai pelajar dan mengikuti kegiatan belajar mengajar, namun dengan tambahan pelatihan fisik dan kedisiplinan ala militer (Jubaedah, 2025). Adanya program barak militer ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kedisiplinan: Melalui rutinitas ketat dan pelatihan fisik, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membentuk Karakter Positif: Dengan pendekatan militeristik, siswa diharapkan dapat mengembangkan karakter yang tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki rasa hormat terhadap aturan.
3. Mendukung Guru dan Orang Tua: Memberikan alternatif solusi bagi guru dan orang tua dalam menangani siswa dengan perilaku menyimpang yang sulit diatasi melalui pendekatan konvensional.

Adapun sasaran pada program barak militer ini ditujukan bagi siswa yang:

1. Terlibat dalam tindakan kenakalan remaja yang serius.
2. Telah melalui proses pembinaan di sekolah namun tidak menunjukkan perubahan perilaku.
3. Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali untuk mengikuti program ini.

Bentuk kegiatan dari kegiatan barak militer ini, yaitu mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obat terlarang (Bappeda Jabar, 2025).

Kang Dedi menegaskan, keikutsertaan dalam program ini bersifat sukarela dan tetap harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Hal ini mengingat peserta sebagian besar masih berada di bawah perwalian. Meski mengikuti kegiatan barak, para peserta tetap berstatus sebagai siswa aktif di sekolah masing-masing. Proses belajar-mengajar tetap dilaksanakan di lokasi barak, sehingga pendidikan formal mereka tetap berjalan.

“Ini merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman pergaulan bebas, penyalahgunaan gawai. Serta kekurangan gizi akibat pola hidup yang tidak teratur”, ucapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, melalui program ini generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, sehat fisik dan mental. Selain itu siap menghadapi tantangan masa depan dengan karakter yang kuat (Gunawan, 2025).

Sebanyak 45 pelajar SMA/SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang, Senin (9/6) pagi kembali diberangkatkan untuk menjalani pendidikan karakter di Depo Pendidikan Rindam 3 Siliwangi di Lembang, Bandung Barat. Pemberangkatan dilakukan di Kodim 0619 Purwakarta Jawa Barat. Setelah melalui proses seleksi dan pengarahan, 45 siswa SMA/SMK dari 3 Kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang, diberangkatkan ke

Dodik Rindam 3 Siliwangi Lembang Bandung Barat, guna menjalani pendidikan karakter di barak militer gelombang ke-2. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzen dan para orangtua masing masing siswa. Sejumlah orangtua terlihat menangis saat melepas kepergian anak mereka ke barak militer. Para siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya orangtua yang meminta anak mereka diikutsertakan dikirim ke barak militer (Sunarya, 2025).

Sebanyak 19 siswa bermasalah dari wilayah Sukabumi kini tengah menjalani Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Bandung. Program yang melibatkan TNI dan Polri ini resmi dimulai pada Senin, (5/5/2025), dan akan berlangsung selama 14 hari. Awalnya, pihak KCD menerima 40 data siswa bermasalah yang dilaporkan oleh guru BK dari masing-masing sekolah. Namun, melalui proses *screening* mendalam, hanya 20 siswa yang dinyatakan layak mengikuti program ini. Kriteria seleksi mempertimbangkan tingkat penyimpangan perilaku, seperti keterlibatan dalam geng motor, tawuran, penyalahgunaan narkoba, kecanduan gawai, hingga tindakan-tindakan yang membahayakan diri dan orang lain. Di barak pelatihan, seluruh kebutuhan siswa dijamin oleh pemerintah. Mereka mendapatkan makanan bergizi, tempat tidur yang layak, dan program yang disusun secara sistematis. Tak hanya itu, para siswa juga menjalani tes psikologi serta minat dan bakat. Harapannya, potensi yang mereka miliki dapat digali dan dikembangkan lebih jauh. Program ini mendapatkan respons positif dari sekolah-sekolah yang terlibat. Antusiasme para guru dan orang tua pun meningkat setelah memahami esensi dari kegiatan ini. Terlebih lagi, seluruh biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada peserta maupun pihak sekolah (Redaksi, 2025).

4. Evaluasi Mekanisme Respon Pemerintah

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan kontroversial berupa program pembinaan anak nakal melalui sistem barak militer (Lucas Medianov Grand, 2025). Kebijakan Program Barak Militer Komando Daerah Militer (KDM) di Jawa Barat merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak yang dianggap bermasalah melalui latihan kemiliteran dan pembentukan karakter, meningkatkan kapasitas dan kesiapan militer di wilayah tersebut, sekaligus berpotensi memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada mekanisme respons pemerintah yang efektif dalam mengelola berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca-implementasi. Evaluasi mendalam terhadap mekanisme respons ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan.

Salah satu aspek penting dalam mekanisme respons adalah koordinasi antar-lembaga. Program Barak Militer KDM melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat sipil. Penelitian (Adillah et al., 2024) dan (Nur Cahya et al., 2023) menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi risiko terlibat dalam perilaku menyimpang. Respons pemerintah yang efektif menuntut koordinasi yang kuat dan terstruktur. Evaluasi perlu menyoroti apakah ada forum koordinasi rutin, mekanisme berbagi informasi yang transparan, dan pembagian tugas yang jelas antar-lembaga. Hambatan seperti tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi dapat menghambat kelancaran program.

Aspek kedua adalah partisipasi publik dan konsultasi. Kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat lokal, seperti pembangunan barak militer, memerlukan proses konsultasi yang inklusif dan transparan. Mekanisme respons pemerintah harus mencakup saluran yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan masukan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari orang tua, sekolah, masyarakat, hingga lembaga pemerintah sangat penting (Asbari, 2025). Evaluasi harus memeriksa apakah pemerintah telah secara proaktif melibatkan komunitas terdampak, apakah masukan mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dan apakah ada

mekanisme pengaduan yang efektif jika terjadi konflik kepentingan atau dampak negatif. Kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan.

Selanjutnya, mekanisme mitigasi dampak sosial dan lingkungan merupakan komponen vital. Intervensi yang berpusat pada penguatan karakter dan kedisiplinan harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk model rehabilitasi yang menggabungkan disiplin militer dengan aktivitas sosial positif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan keteladanan dan disiplin dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku remaja (Mulati, 2023). Selain itu, kekhawatiran mengenai pendekatan militeristik terhadap anak, khususnya dalam konteks program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, adalah isu yang sangat krusial dan memerlukan evaluasi mendalam. Pernyataan bahwa pendekatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional bukanlah tuduhan tanpa dasar, melainkan refleksi dari standar hak anak yang diakui secara universal. Maka dari itu munculah pro dan kontra terhadap program pengiriman anak-anak "nakal" ke barak militer untuk didisiplinkan, yang mencerminkan pertentangan antara pendekatan keras dan pendekatan yang lebih humanis serta menghargai hak anak (Chairani et al., 2025). Evaluasi terhadap permasalahan ini harus menyoroti beberapa dimensi penting.

1. Perspektif hukum dan etika : penggunaan pendekatan yang keras dan otoriter terhadap anak-anak, meskipun dengan niat rehabilitasi, berpotensi melanggar sejumlah instrumen hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghormati hak anak untuk didengar, dan memastikan bahwa setiap intervensi tidak merugikan perkembangan fisik dan mental mereka. Pendekatan militeristik yang cenderung mengedepankan disiplin ketat, hukuman fisik atau non-fisik yang merendahkan, serta lingkungan yang kaku, dapat secara langsung berbenturan dengan prinsip-prinsip ini, menjadikannya sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak.
2. Perspektif efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial : kritik yang menyatakan bahwa pendekatan militeristik justru kontraproduktif sangatlah beralasan. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu anak untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat, memperbaiki perilaku menyimpang, dan mengembangkan keterampilan hidup yang positif. Pendekatan yang didasarkan pada ketakutan dan kepatuhan paksa jarang menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan dan internal. Anak-anak mungkin patuh selama berada di bawah pengawasan ketat, tetapi begitu lingkungan kontrol dihilangkan, perilaku negatif bisa muncul kembali. Reintegrasi sosial yang sukses membutuhkan anak untuk mengembangkan empati, keterampilan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif, dan rasa tanggung jawab pribadi, bukan hanya kepatuhan tanpa pemahaman. Pendekatan militeristik cenderung menekan individualitas dan kreativitas, yang esensial untuk adaptasi sosial yang sehat. Sebaliknya, pendekatan berbasis hak anak yang mengedepankan pendidikan, konseling, terapi, pengembangan keterampilan vokasi, dan dukungan psikososial terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi yang langgeng.

Dengan demikian, evaluasi terhadap permasalahan ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan fundamental antara pendekatan militeristik dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tujuan rehabilitasi yang sesungguhnya. Untuk program yang melibatkan anak, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, berpusat pada anak, dan berbasis bukti, yang menjunjung tinggi martabat anak serta mempromosikan perkembangan mereka secara positif. Respons pemerintah harus mencakup studi dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif, rencana mitigasi yang jelas, dan program kompensasi yang adil jika diperlukan. Evaluasi harus menilai efektivitas implementasi rencana mitigasi ini dan apakah ada monitoring berkelanjutan terhadap dampak yang timbul.

Aspek keempat adalah pengalokasian anggaran dan akuntabilitas keuangan. Implementasi program sebesar Barak Militer KDM membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Mekanisme respons pemerintah harus memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi harus meninjau proses pengadaan barang dan jasa, audit internal dan eksternal, serta mekanisme pelaporan keuangan. Potensi kebocoran anggaran atau penyalahgunaan dana dapat merusak integritas program dan menghambat pencapaian tujuan. Terakhir, mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Pemerintah harus memiliki sistem yang robust untuk memantau kemajuan program dan mengevaluasi pencapaian target. Ini mencakup indikator kinerja yang jelas, pengumpulan data yang sistematis, dan laporan kemajuan berkala. Evaluasi harus memeriksa apakah data monitoring digunakan untuk pengambilan keputusan yang informasional, apakah ada evaluasi independen yang dilakukan, dan apakah rekomendasi dari evaluasi diimplementasikan untuk perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap mekanisme respons pemerintah dalam Kebijakan Program Barak Militer KDM di Jawa Barat adalah kunci untuk memastikan program ini tidak hanya mencapai tujuan awalnya tetapi juga terlaksana secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Barat. Perbaikan pada area-area yang disebutkan di atas akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.

5. Rekomendasi Perbaikan Responsivitas

Rekomendasi terhadap Kebijakan Program Barak Militer Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat menyoroti beberapa tantangan krusial, terutama terkait dengan responsivitas dan pendekatan terhadap anak-anak yang bermasalah. Meskipun niat awal program adalah baik yaitu mendisiplinkan dan membentuk karakter remaja melalui sistem barak militer kritik yang muncul mengenai potensi pelanggaran hak anak dan efektivitas rehabilitasi jangka panjang tidak dapat diabaikan. Untuk meningkatkan responsivitas dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan rehabilitasi yang sebenarnya, beberapa rekomendasi perbaikan mendesak perlu diimplementasikan.

1. Pergeseran Paradigma: Dari Disiplin Militeristik ke Pendekatan Berbasis Hak Anak

Rekomendasi paling fundamental adalah pergeseran paradigma total dalam penanganan anak-anak yang dianggap bermasalah. Mengingat kekhawatiran yang valid tentang pendekatan militeristik yang berpotensi melanggar hak anak dan kontraproduktif untuk rehabilitasi, program harus diubah dari "Barak Militer" menjadi "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Remaja Berbasis Komunitas" atau sejenisnya.

- a. Revisi Kerangka Hukum dan Etika: Pastikan seluruh aspek program selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia. Ini berarti menghilangkan unsur-unsur yang cenderung otoriter, menghargai martabat anak, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap intervensi.
- b. Fokus pada Rehabilitasi Holistik: Ganti model disiplin militer dengan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif. Ini mencakup:
- c. Konseling dan Terapi Psikososial: Penanganan trauma, masalah emosional, dan perilaku menyimpang oleh profesional terlatih.
- d. Pendidikan yang Berkelanjutan: Memastikan anak tetap memiliki akses pendidikan formal atau non-formal yang sesuai.
- e. Pengembangan Keterampilan Hidup dan Vokasi: Memberikan keterampilan praktis untuk reintegrasi sosial dan ekonomi yang sukses.
- f. Aktivitas Kreatif dan Rekreasi: Mendorong ekspresi diri dan pengembangan minat yang positif.
- g. Pelatihan Staf yang Komprehensif: Personel yang terlibat harus dilatih dalam psikologi perkembangan anak, penanganan trauma, teknik konseling, dan pendekatan berbasis hak anak, bukan hanya disiplin militer.

2. Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dan Keterlibatan Multistakeholder yang Inklusif
Responsivitas program akan meningkat drastis dengan adanya partisipasi aktif dan bermakna dari semua pemangku kepentingan, terutama orang tua, komunitas lokal, dan ahli perlindungan anak.
 - a. Forum Konsultasi Rutin: Bentuk forum konsultasi yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak, psikolog, dan dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan). Forum ini harus menjadi wadah untuk menyampaikan masukan, kekhawatiran, dan bahkan usulan perbaikan secara berkala.
 - b. Mekanisme Pengaduan yang Efektif dan Aman: Sediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan menjamin kerahasiaan bagi anak-anak maupun orang tua yang merasa haknya dilanggar atau mengalami perlakuan tidak pantas. Pastikan ada proses investigasi dan tindak lanjut yang jelas.
 - c. Keterlibatan Komunitas dalam Perencanaan dan Monitoring: Libatkan komunitas lokal dalam penentuan lokasi, desain fasilitas, dan bahkan pengawasan jalannya program. Ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas kolektif.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Menyeluruh
Untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan program berjalan sesuai koridor, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.
 - a. Publikasi Informasi Program yang Jelas: Sediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami mengenai tujuan program, kriteria seleksi anak, proses pembinaan, hak-hak anak selama program, serta mekanisme evaluasi. Ini bisa melalui situs web resmi, brosur, atau sosialisasi langsung.
 - b. Audit Independen dan Reguler: Lakukan audit keuangan dan kinerja secara berkala oleh lembaga independen. Hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka untuk memastikan efisiensi anggaran dan keberhasilan pencapaian tujuan.
 - c. Indikator Kinerja yang Terukur dan Berbasis Bukti: Kembangkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) untuk mengevaluasi dampak program terhadap perilaku anak, kesejahteraan psikologis, dan reintegrasi sosial. Data harus dikumpulkan secara sistematis dan digunakan untuk pengambilan keputusan.
4. Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dan Keterlibatan Multistakeholder yang Inklusif
Responsivitas program akan meningkat drastis dengan adanya partisipasi aktif dan bermakna dari semua pemangku kepentingan, terutama orang tua, komunitas lokal, dan ahli perlindungan anak.
 - a. Forum Konsultasi Rutin: Bentuk forum konsultasi yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak, psikolog, dan dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan). Forum ini harus menjadi wadah untuk menyampaikan masukan, kekhawatiran, dan bahkan usulan perbaikan secara berkala.
 - b. Mekanisme Pengaduan yang Efektif dan Aman: Sediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan menjamin kerahasiaan bagi anak-anak maupun orang tua yang merasa haknya dilanggar atau mengalami perlakuan tidak pantas. Pastikan ada proses investigasi dan tindak lanjut yang jelas.
 - c. Keterlibatan Komunitas dalam Perencanaan dan Monitoring: Libatkan komunitas lokal dalam penentuan lokasi, desain fasilitas, dan bahkan pengawasan jalannya program. Ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas kolektif.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Menyeluruh
Untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan program berjalan sesuai koridor, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.
 - a. Publikasi Informasi Program yang Jelas: Sediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami mengenai tujuan program, kriteria seleksi anak, proses pembinaan, hak-hak anak selama program, serta mekanisme evaluasi. Ini bisa melalui situs web resmi, brosur, atau sosialisasi langsung.

- b. Audit Independen dan Reguler: Lakukan audit keuangan dan kinerja secara berkala oleh lembaga independen. Hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka untuk memastikan efisiensi anggaran dan keberhasilan pencapaian tujuan.
 - c. Indikator Kinerja yang Terukur dan Berbasis Bukti: Kembangkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) untuk mengevaluasi dampak program terhadap perilaku anak, kesejahteraan psikologis, dan reintegrasi sosial. Data harus dikumpulkan secara sistematis dan digunakan untuk pengambilan keputusan.
6. Koordinasi Antar-Lembaga yang Terintegrasi dan Jelas
Perbaiki koordinasi antar-lembaga yang terlibat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan kelancaran program.
- a. Tim Koordinasi Lintas Sektor: Bentuk tim koordinasi tetap yang melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Tim ini harus memiliki jadwal pertemuan rutin dan mekanisme berbagi informasi yang efektif.
 - b. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab yang Jelas: Susun matriks peran dan tanggung jawab yang eksplisit untuk setiap lembaga yang terlibat, meminimalkan potensi konflik dan memastikan setiap aspek program memiliki penanggung jawab yang jelas.
7. Mekanisme Mitigasi Dampak dan Evaluasi Berkelanjutan
Fokus pada mitigasi dampak negatif dan evaluasi yang proaktif adalah kunci untuk program yang responsif.
- a. Kajian Dampak Sosial dan Psikologis: Lakukan kajian dampak sosial dan psikologis secara mendalam sebelum, selama, dan setelah implementasi program. Temuan ini harus menjadi dasar untuk penyesuaian program.
 - b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal yang Robust: Terapkan sistem monitoring dan evaluasi internal yang kuat dengan melibatkan para ahli independen. Hasil evaluasi harus dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan penyesuaian strategi.
 - c. Program Reintegrasi Sosial Pasca Program: Pastikan ada program dukungan pasca-pembinaan yang memadai, seperti pendampingan keluarga, dukungan sekolah, atau fasilitasi akses ke layanan kesehatan mental, untuk memastikan keberhasilan reintegrasi anak ke masyarakat.
- Dengan mengadopsi rekomendasi ini, Kebijakan Program Barak Militer Kang Dedi Mulyadi dapat bertransformasi menjadi sebuah inisiatif yang lebih responsif, berlandaskan hak asasi manusia, dan benar-benar efektif dalam membina remaja Jawa Barat untuk masa depan yang lebih baik.

SIMPULAN

Program Barak Militer KDM yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan sebagai solusi atas maraknya kenakalan remaja dengan pendekatan kedisiplinan ala militer. Meskipun program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak masyarakat karena dianggap mampu membentuk karakter remaja yang lebih disiplin dan nasionalis, namun tetap menuai kritik, terutama dari sisi perlindungan hak anak dan efektivitas jangka panjang. Evaluasi menunjukkan perlunya revisi kebijakan ke arah yang lebih humanis, berbasis hak anak, serta menekankan pendekatan edukatif dan konseling daripada pendekatan koersif. Responsivitas, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar-lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Program ini disarankan bertransformasi menjadi pusat pembinaan remaja yang berorientasi pada rehabilitasi holistik dan pengembangan potensi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Salim Faqih, R. A., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor).

- Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>
- Asbari, M. (2025). *Kenakalan Remaja dan Geng Motor sebagai Gejala Sosial-Kultural: Rekomendasi Rehabilitasi Sistemik melalui Integrasi Barak TNI dan Gerakan Pramuka*. 02(01), 12–17.
- Azwar, B. (2023). Pemahaman guru bimbingan konseling terhadap kurikulum merdeka belajar. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.29210/1202322167>
- BappedaJabar. (2025). *KDM: Program Barak Militer Bentuk Karakter dan Kembalikan Jati Diri Remaja Bermasalah*. 29 April.
- Chairani, P. D., Aliya, N., Nabila, A., & Juwaira, A. (2025). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A . Van Dijk terhadap Wacana Pro-Kontra Pengiriman Anak ke Barak Militer dalam*. 1(4), 715–720.
- Dinda Aisha, Eka Mardia, P. R. U. R. (2023). Peran Parental Involvement Terhadap Juvenile Delinquency Pada Remaja di Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 11036–11040.
- Gunawan, A. (2025). *KDM Dorong Program Barak Disiplin Bentuk Karakter Remaja*. 30 April. [https://www.rri.co.id/daerah/1486884/kdm-dorong-program-barak-disiplin-bentuk-karakter-remaja#:~:text=la](https://www.rri.co.id/daerah/1486884/kdm-dorong-program-barak-disiplin-bentuk-karakter-remaja#:~:text=la%20menjelaskan%20bahwa%20program%20barak,depan%20dengan%20karakter%20yang%20kuat) menjelaskan bahwa program barak,depan dengan karakter yang kuat.
- Jubaedah, N. (2025). *Info Gubernur Jabar: Mengapa Dedi Mulyani Ingin Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer? Ini Tujuan dan Pro-Kontranya*. 3 Mei.
- Karo-Karo, S., Pardede, M., Simamora, P. R. T., & Tamba, L. (2023). Implementation of Character Education for Students in the Era of Digitalization. *Jurnal Penelitian PendidikanIPA*,9(SpecialIssue),1402–1407. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9ispecialissue.6424>
- Lucas Medianov Grand, D. (2025). *Analisis yuridis kebijakan gubernur jawa barat terhadap pembinaan anak nakal melalui program barak militer dalam perspektif hukum perlindungan anak*. 5(02).
- Mulati, Y. (2023). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Perilaku Menyimpang Pada Remaja. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 15(2), 135–144. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v15i2.632>
- Nur Cahya, M., Ningsih, W., & Lestari, A. (2023). Dampak Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial pada Kecemasan dan Depresi Remaja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(8), 704–706. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917>
- Nurhidayah, S., Yuningsih, T., & Djumiarti, T. (2023). Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi (Perbup No. 41 Tahun 2022). *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–20.
- Qurtubi, A. (2024). Evaluasi Dampak Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*.
- Rasdiana, & Riski Ramadani. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 249–265. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.76>
- Redaksi. (2025). *Berani Berubah, 19 Pelajar Sukabumi Ikut Pelatihan Barak Militer Masa Depan Cerah*. 06 Mei.
- Role, T., Parents, O., The, I., Recovery, M., In, C., With, C., & Law, T. (2025). *Merdeka Merdeka*. 11(1), 68–78.
- Sunarya, R. (2025). *Lagi, 45 Pelajar SMK Dikirim ke Barak Militer*. 09 Juni.
- Tofik Yanuar Chandra. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11, 179–190. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Triningsih, R. (2022). Pengembangan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Kepramukaan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 19 159 (2003).
- Yunanto, M. K., & Fitriyani, Y. (2025). *Responsivitas Pelayanan Publik terhadap Pengguna Layanan Rawat Jalan*. 5, 797–806.